**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2020**

**UAPPA-W NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Majapahit No.58

Mataram - Mataram

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

**Jl. Majapahit No.58**

**Mataram - Mataram**

****

**LAPORAN KEUANGAN**

**UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Majapahit No.58**

**Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074**

 **Mataram - Mataram**

 **e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com**

*KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Mataram, 9 Oktober 2020

Kepala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah Nusa Tenggara Barat

Sekretaris,

MISNUDIN, SH., MH.

NIP. 196412311994031046

*DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

[Kata Pengantar i](#_Toc527539948)

[Daftar Isi iii](#_Toc527539949)

[PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1](#_Toc527539950)

[Ringkasan 2](#_Toc527539951)

[I. Laporan Realisasi Anggaran 6](#_Toc527539952)

[II. Neraca 8](#_Toc527539953)

[III. Laporan Operasional 11](#_Toc527539954)

[IV. Laporan Perubahan Ekuitas 14](#_Toc527539955)

[III. Catatan atas Laporan Keuangan 16](#_Toc527539956)

[A. Penjelasan Umum 16](#_Toc527539957)

[A.1. Dasar Hukum 16](#_Toc527539958)

[A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Mataram 17](#_Toc527539959)

[A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 19](#_Toc527539960)

[A.4. Basis Akuntansi 20](#_Toc527539961)

[B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 29](#_Toc527539962)

[B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 29](#_Toc527539963)

[B.2. Belanja Negara 30](#_Toc527539964)

[C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 32](#_Toc527539965)

[C.1. Aset Lancar 32](#_Toc527539966)

[C.2. Aset Tetap 34](#_Toc527539967)

[C.5. Kewajiban Jangka Pendek 36](#_Toc527539968)

[C.6. Ekuitas 36](#_Toc527539969)

[D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 36](#_Toc527539970)

[D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 36](#_Toc527539971)

[D.2. Beban Pegawai 37](#_Toc527539972)

[D.3. Beban Persediaan 37](#_Toc527539973)

[D.4. Beban Barang dan Jasa 37](#_Toc527539974)

[D.5. Beban Pemeliharaan 38](#_Toc527539975)

[D.6. Beban Perjalanan Dinas 38](#_Toc527539976)

[D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 38](#_Toc527539977)

[D.8. Beban Bantuan Sosial 38](#_Toc527539978)

[D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 39](#_Toc527539979)

[D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 39](#_Toc527539980)

[D.11. Beban Lain-lain 39](#_Toc527539981)

[D.12. Kegiatan Non Operasional 39](#_Toc527539982)

[D.13. Pos Luar Biasa 40](#_Toc527539983)

[E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 41](#_Toc527539984)

[E.1. Ekuitas Awal 41](#_Toc527539985)

[E.2. Surplus (Defisit) LO 41](#_Toc527539988)

[E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi 41](#_Toc527539991)

[E.4. Penyesuaian Nilai Aset 41](#_Toc527539994)

[E.5. Koreksi Nilai Persediaan 41](#_Toc527539997)

[E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap 42](#_Toc527540000)

[E.7. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 42](#_Toc527540003)

[E.8. Koreksi Lain-lain 42](#_Toc527540006)

[E.9. Transaksi Antar Entitas 42](#_Toc527540009)

[E.9.1. Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain 43](#_Toc527540012)

[E.9.2. Transfer Masuk 43](#_Toc527540013)

[E.10. Pengesahan Hibah Langsung 43](#_Toc527540014)

[E.1. Ekuitas Akhir 44](#_Toc527540015)

[F. Pengungkapan Penting Lainnya 44](#_Toc527540017)

[F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 44](#_Toc527540018)

[F.2. Pengungkapan Lain-lain 44](#_Toc527540019)

[F.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK 44](#_Toc527540020)

[F.4. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 44](#_Toc527540021)

[F.5. Rekening Pemerintah 45](#_Toc527540022)

[F.6. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3 45](#_Toc527540023)

[F.7. Revisi DIPA 45](#_Toc527540024)

[F.8. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB 45](#_Toc527540025)

[F.9. Catatan Penting Lainnya 45](#_Toc527540026)

[Laporan-laporan Pendukung 46](#_Toc527540027)

*PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**Pengadilan Tinggi Agama Mataram**

**Jl. Majapahit No.58 Mataram Nusa Tenggara Barat**

 **Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Peradilan Agama Tingkat Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 09 Oktober 2020

Kepala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah Nusa Tenggara Barat

Sekretaris,

MISNUDIN, SH., MH.

NIP. 196412311994031046

*RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Triwulan III Tingkat UAPPA-W Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 September 2020*.*

Realisasi Pendapatan Negara selama Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp697.005.382 atau mencapai 126 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.553.503.000.

Realisasi Belanja Negara selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.069.852.455 atau mencapai 68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.577.244.000.

1. **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2020 dan 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 September 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp110.342.113, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp110.342.113; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp77.548.750 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp77.548.750 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp32.793.363.

1. **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2020 adalah sebesar Rp696.925.382, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.086.793.127 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(124.486.818). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan defisit sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(389.867.745).

1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp30.113.074 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(389.599.626) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp392.279.915 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2020 adalah senilai Rp32.793.363.

1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 September 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

1. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019**

***( dalam satuan Rupiah*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | Catatan | TA 2020 | TA 2019 |
| **Anggaran**  | **Realisasi** | **%**  | **Realisasi** |
| A. | **Pendapatan Negara dan Hibah** | **B.1** |  |  |  |  |
| 1. | **Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **B.1.1** | **553.503.000** | **697.005.382** | **126** | **603.863.700** |
|  | **Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah** |  | **553.503.000** | **697.005.382** | **126** | **603.863.700** |
| B. | **Belanja Negara** | **B.2** |  |  |  |  |
| 1. | **Belanja Pegawai** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **Belanja Barang** |  | **1.577.244.000** | **1.069.852.455** | **68** | **1.042.148.960** |
| 3. | **Belanja Modal** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Belanja Negara** |  | **1.577.244.000** | **1.069.852.455** | **68** | **1.042.148.960** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *NERACA PERBANDINGAN*

# II. Neraca

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**NERACA**

**PER 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 September 2020 | 31 Desember 2019 |
| ASET |  |  |  |  |
| Aset Lancar | **C.1** |  |  |  |
| Kas dan Bank |  |  |  |  |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran**  | **C.1.** |  | **77.548.750** | **0** |
|  | **Kas di Bendahara Penerimaan** |  |  | **0** | **80.000** |
|  | **Kas Lainnya dan Setara Kas** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Persediaan** | **C.1.** |  | **32.793.363** | **30.033.074** |
|  | **Jumlah Aset Lancar** |  |  | **110.342.113** | **30.113.074** |
| Aset Tetap | **C.2** |  |  |  |
|  | **Tanah** | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Peralatan dan Mesin** | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Gedung dan Bangunan** | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Aset Tetap Lainnya**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Konstruksi dalam Pengerjaan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Aset Tetap** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Aset** |  |  | **110.342.113** | **30.113.074** |
| KEWAJIBAN |  |  |  |  |
| Kewajiban Jangka Pendek  | **C.5** |  |  |  |
|  | **Uang Muka dari KPPN**  | **C.5.** |  | **77.548.750** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** |  |  | **77.548.750** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban** |  |  | **77.548.750** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EKUITAS |  |  |  |  |
| Ekuitas  | **C.6** |  | **32.793.363** | **30.113.074** |
|  | **Jumlah Ekuitas**  |  |  | **32.793.363** | **30.113.074** |
|  | **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas** |  |  | **110.342.113** | **30.113.074** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN OPERASIONAL*

# III. Laporan Operasional

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**PER 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 2020 | 2019 |
| Kegiatan Operasional |  |  |  |  |
| Pendapatan |  |  |  |  |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | **D.1** |  | **696.925.382** | **598.265.600** |
| Jumlah Pendapatan |  |  | **696.925.382** | **598.265.600** |
| Beban |  |  |  |  |
|  | **Beban Pegawai** | **D.** | **2** | **0** | **0** |
|  | **Beban Persediaan** | **D.** | **3** | **16.940.672** | **16.683.297** |
|  | **Beban Barang dan Jasa** | **D.** | **4** | **664.900.820** | **648.452.960** |
|  | **Beban Pemeliharaan** | **D.** | **5** | **0** | **0** |
|  | **Beban Perjalanan DInas** | **D.** | **6** | **404.951.635** | **393.696.000** |
|  | **Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat** | **D.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Beban Bantuan Sosial** | **D.** | **8** | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **D.** | **9** | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **D.** | **10** | **0** | **0** |
|  | **Beban Lain-lain** | **D.** | **11** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Beban** |  |  | **1.086.793.127** | **1.058.832.257** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional** |  |  | **(389.867.745)** | **(460.566.657)** |
| Kegiatan Non Operasional  | **D.** | **12** |  |  |  |
|  | **Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan** |  |  | **268.119** | **0** |
|  | **Defisit Penjualan Aset Non Lancar**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Defisit Selisih Kurs**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**  |  |  | **268.119** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa** |  |  | **(389.599.626)** | **(460.566.657)** |
| Pos Luar Biasa | **D.**  | **13** |  |  |  |
|  | **Pendapatan PNBP** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Persediaan**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Laporan Operasional** |  |  | **(389.599.626)** | **(460.566.657)** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *PERUBAHAN EKUITAS*

# IV. Laporan Perubahan Ekuitas

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PER 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 2020 | 2019 |
| Ekuitas Awal | **E.** | **1** | **30.113.074** | **43.954.576** |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | **E.** | **2** | **(389.599.626)** | **(460.566.657)** |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar |  |  |  |  |
| Lain-lain |  |  |  |  |
|  | **Koreksi Nilai Persediaan** | **E.** | **3** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Aset Tetap** | **E.** | **4** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Atas Beban** | **E.** | **5** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Atas pendapatan** | **E.** | **6** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Lain-lain** | **E.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Lain-lain** |  |  | **0** | **0** |
| Transaksi Antar Entitas  | **E.** | **8** | **392.279.915** | **438.285.260** |
| Ekuitas Akhir |  |  | **32.793.363** | **21.673.179** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

# III. Catatan atas Laporan Keuangan

## Penjelasan Umum

### Dasar Hukum

|  |
| --- |
| * 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 |
| * 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 |
| * 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
 |
| * 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 |
| * 1. Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor10 Tahun 2010Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada BAS;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada BAS;
 |
| * 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 |
| * 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 |

### Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung". Adapun penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
	2. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;
	3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah

* + 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
		2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
		3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
		4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
		5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengadilan.
2. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan.
3. Meningkatnya Proses penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Tertib administrasi perkara.
5. Mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
6. Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutebel.
8. Pelaksanaan putusan/penetapan (eksekutebel) dan penyelesaian yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Peradilan Agama Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Jumlah satuan kerja di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah 9 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 9 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | KodeEselon | Uraian Satker | Jumlah Jenis Kewenangan | Jumlah Satker |
| **KP** | **KD** | **DK** | **TP** |
| **M** | **TM** | **M** | **BM** | **M** | **BM** | **M** | **BM** |
| 1 | **04** | **Pengadilan Agama Mataram** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | **04** | **Pengadilan Agama Sumbawa** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | **04** | **Pengadilan Agama Praya** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | **04** | **Pengadilan Agama Selong** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | **04** | **Pengadilan Agama Bima** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | **04** | **Pengadilan Agama Dompu** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | **04** | **Pengadilan Tinggi Agama Mataram** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | **04** | **Pengadilan Agama Giri Menang** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | **04** | **Pengadilan Agama Taliwang** |  |  | **V** |  |  |  |  |  | 1 |
| Jumlah |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |

*Keterangan:*

*M = Menyampaikan LK*

*BM = Belum menyampaikan LK*

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

|  |  |
| --- | --- |
| *Dasar Pengukuran*  | **A.4. Dasar Pengukuran** Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papuadalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. |
| *Kebijakan Akuntansi* | **A.5. Kebijakan Akuntansi**Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah sebagai berikut: |
| *Pendapatan-LRA* | 1. **Pendapatan- LRA**
* Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
* Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
* Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
 |
| *Pendapatan-LO* | 1. **Pendapatan- LO**
* Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
	+ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
	+ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
	+ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
* Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
* Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
 |
| *Belanja* | 1. **Belanja**
* Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
* Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
* Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
* Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 |
| *Beban* | 1. **Beban**
* Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
* Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
* Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 |
| *Aset* | 1. **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. |
| *Aset Lancar* | * 1. **Aset Lancar**
* Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
* Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
* Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
* Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | * + - 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
 | 100% |
| * + - 1. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
 |

* Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
* Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
 |
| *Aset Tetap* | * 1. **Aset Tetap**
* Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
* Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
* Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
* Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 |
| *Penyusutan Aset Tetap* | * 1. **Penyusutan Aset Tetap**
* Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
* Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
	1. Tanah
	2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
	3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
* Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
* Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok Aset Tetap** | **Masa Manfaat** |
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

 |
| *Piutang Jangka Panjang* | * 1. **Piutang Jangka Panjang**
* Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
* Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
 |
| *Aset Lainnya* | * 1. **Aset Lainnya**
	+ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
	+ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
* Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok Aset Tak Berwujud** | **Masa Manfaat (tahun)** |
| *Software* Komputer | 4 |
| *Franchise* | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

* + Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 |
|  *Kewajiban* | 1. **Kewajiban**
* Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
* Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.* Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
 |
|  *Ekuitas*  | 1. **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. |

## Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pendapatan Negara dan Hibah |
| ***Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah: Rp. 697.005.382*** | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp697.005.382 atau mencapai 125,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp553.503.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah : |
|  | Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2020***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|  | **Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan** | **0** | **10.000** | **0,00** |
|  | **Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)** | **23.965.000** | **11.740.000** | **48,99** |
|  | **Pendapatan Ongkos Perkara** | **300.391.000** | **258.345.000** | **86,00** |
|  | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **229.147.000** | **426.910.382** | **186,30** |
|  | **Total Pendapatan** | **553.503.000** | **697.005.382** | **125,93** |

  |
|  | Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2020 dan 2019***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Perubahan |
| Rp. | % |
|  | **Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan** | **10.000** | **30.000** | **-20.000** | **-66,67** |
|  | **Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)** | **11.740.000** | **15.776.000** | **-4.036.000** | **-25,58** |
|  | **Pendapatan Ongkos Perkara** | **258.345.000** | **254.145.000** | **4.200.000** | **1,65** |
|  | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **426.910.382** | **333.912.700** | **92.997.682** | **27,85** |
|  | **Total Pendapatan** | **697.005.382** | **603.863.700** | **93.141.682** | **15,42** |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp93.141.682 atau 15,42% dari realisasi pendapatan TA 2019. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang putus di Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 pada periode yang sama. |
|  | Belanja Negara |
| ***Realisasi Belanja Negara: Rp.1.069.852.455*** | Realisasi Belanja Negara pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020 sebesar Rp1.069.852.455 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau 68% dari anggaran senilai Rp1.577.244.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian |  30 September 2020 |
| **Pagu** | **Realisasi** | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | **0** |
|  Belanja Barang | **1.577.244.000** | **1.069.852.455** | **68** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0** |
|  Total Belanja Bruto | **1.577.244.000** | **1.069.852.455** | **68** |
|  Pengembalian Belanja | **0** | **0** | **0** |
|  Total Belanja Netto | **1.577.244.000** | **1.069.852.455** | **68** |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019*(dalam satuan Rupiah)****Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020***Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dibandingkan 2019 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengalami kenaikan sebesar Rp27.703.495 atau 2,66% dari pagu belanja. Kenaikan disebabkan kondisi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2020 setelah Indonesia menghadapi pandemi Covid 19 di awal tahun, maka di masa normal yang baru atau kebiasaan baru, setiap satuan kerja melaksanakan kegiatan yang belum dapat direalisasikan sebelum berakhir periode Semester I Tahun 2020, sehingga banyak kegitan yang direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2020. Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 TA 2019*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik (Turun) |
| **Rp.** | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  Belanja Barang | **1.069.852.455** | **1.042.148.960** | **27.703.495** | **2,66** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Total Belanja | **1.069.852.455** | **1.042.148.960** | **27.703.495** | **2,66** |

 |
|  | Belanja Barang |
| ***Realisasi Belanja Barang : Rp1.069.852.455*** | Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.069.852.455 dan Rp1.042.148.960. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp27.703.495 atau 2,66% dibandingkan Tahun 2019. Kenaikan disebabkan kondisi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2020 setelah Indonesia menghadapi pandemi Covid 19 di awal tahun, maka pasca Semester I Tahun 2020 setiap satuan kerja mengejar keterlambatan realisasi anggaran, sehingga banyak kegitan yang direalisasikan pada Triwulan III seperti Sidang Keliling, pembebasan biaya perkara, layanan hokum, dan perjalanan dinas untuk Pengawasan dan APM untuk kegiatan tingkat banding. Rincin Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Perubahan |
|  | **Realisasi** | **Realisasi** | **Rp.** | **%** |
| Belanja Barang Operasional | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0,00** |
| Belanja Barang Non Operasional | **364.524.000** | **399.541.000** | **-35.017.000** | **-8,76** |
| Belanja Jasa  | **285.662.900** | **248.911.960** | **36.750.940** | **14,76** |
| Belanja Perjalanan Dinas | **404.960.635** | **393.696.000** | **11.264.635** | **2,86** |
| Total Belanja Brutto | **1.070.147.535** | **1.042.148.960** | **27.998.575** | **2,69** |
| Pengembalian Belanja | **-295.080** | **0** | **-295.080** | **0,00** |
| Total Belanja Netto | **1.069.852.455** | **1.042.148.960** | **27.703.495** | **2,66** |

 |

## Penjelasan atas Pos-pos Neraca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aset Lancar: Rp110.342.113*** | Aset LancarNilai Aset Lancar per 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp110.342.113 dan Rp30.113.074.Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.Rincian Aset Lancar pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:Tabel 8 Rincian Aset Lancar per 30 September 2020 dan 2019*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | TA 2020 | TA 2019 |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **77.548.750** | **0** |
|  | **Kas di Bendahara Penerimaan** | **0** | **80.000** |
|  | **Persediaan** | **32.793.363** | **30.033.074** |
|  | **Total Aset Lancar** | **110.342.113** | **30.113.074** |

 |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| ***Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp77.548.750*** | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp77.548.750 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :Tabel 9 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian Satker | Jenis | 30 September 2020 | 31 Desember TA 2019 |
| 1234567 |  **PA Mataram****PA Giri Menang****PA Praya****PA Selong****PA Sumbawa Besar****PA Dompu****PA Bima** | **Uang Persediaan****Uang Persediaan****Uang Persediaan****Uang Persediaan****Uang Persediaan****Uang Persediaan****Uang Persediaan** | **9.000.000****14.000.000****18.000.000****5.850.000****5.868.750****2.310.000****10.320.000** | **0****0****0****0****0****0****0** |
| 8 | **PA Taliwang** | **Uang Persediaan** | **12.200.000** | **0** |
|  |  | **Jumlah Total** | **77.548.750** | **0** |

  |
|  | Kas di Bendahara Penerimaan |
| ***Kas di Bendahara Penerimaan: Rp0*** | Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp80.000 yang merupakan kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas Negara. Saldo kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2019 yang disetor di Tahun 2020 untuk Pengadilan Agama Taliwang merupakan PNBP Hak redaksi, pemberitahuan isi putusan (PBT), dan pencabutan gugatan. Sementara pada Pengadilan Agama Mataram merupakan PNBP atas penyerahan Salinan putusan. Saldo kas pada kedua satuan kerja tersebut telah disetorkan ke kas negara masing-masing dengan NTPN B9F0A48VU9515HNS dan 1409361QTUA7OEN6.Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian Satker | Jenis | 30 September 2020 | 31 Desember TA 2019 |
| 123456 |  **PA Mataram****PA Bima****PTA NTB****PA Taliwang****PA Girimenang****PA Selong** | **PNBP belum setor, PSP****Sisa Biaya Penyelesaian Perkara****PNBP belum disetor** **PNBP belum disetor** **Sisa Biaya Penyelesaian Perkara****Sisa Biaya Penyelesaian Perkara** | **0****0****0****0****0****0** | **40.000****0****0****40.000****0****0** |
|  |  | **Jumlah Total** | **0** | **80.000** |

  |
|  | Persediaan |
| ***Persediaan: Rp32.793.363*** | Persediaan per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp32.793.363 dan Rp30.033.074. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dalam hal ini berupa buku/ register/ akta cerai yang digunakan untuk mencatat proses perkara di lingkungan Peradilan Agama, yang diperoleh melalui transfer masuk yang dikirim oleh Badilag ke PTA Mataram, dan dilanjutkan proses Transfer keluar/masuk dari PTA Mataram ke Pengadilan Tingkat Pertama di bawah PTA Mataram.Rincian Persediaan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 30 September 2020 | 31 Desember 20178 |
| 1 | **Barang Konsumsi** | **32.793.363** | **30.033.074** |
| 2 | **Persediaan Barang Hasil Sitaan** | **0** | **0** |
| 3 | **Persediaan lainnya** | **0** | **0** |
|  | **Total** | **32.793.363** | **30.033.074** |

 Nilai persediaan pada masing-masing satuan kerja dalam kondisi baik.  |
|  | Aset Tetap |
|  | Nilai Aset Tetap per 30 September 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:Tabel 12 Rincian Aset Tetap*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Perubahan |
| 1 | **Tanah** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | **Peralatan dan Mesin** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **Gedung dan Bangunan** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | **Jalan , Irigasi, dan Jaringan** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | **Aset Tetap Lainnya** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Konstruksi dalam Pengerjaan** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Nilai Buku Aset Tetap** | **0** | **0** | **0** |

 |
|  | Tanah |
| ***Tanah: Rp. 0***  | Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Peralatan dan Mesin |
| ***Peralatan dan Mesin : Rp. 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
|  | Gedung dan Bangunan |
| ***Gedung dan Bangunan : Rp. 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
|  | Jalan , Irigasi, dan Jaringan |
| ***Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Aset Tetap Lainnya |
| ***Aset Tetap Lainnya: Rp. 0***  | Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Konstruksi dalam Pengerjaan |
| ***Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0***  | Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap |
| ***Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0***  | Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. |
|  | Kewajiban Jangka Pendek |
| ***Kewajiban Jangka Pendek: Rp77.548.750*** | Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp77.548.750 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020 disajikan pada tabel di bawah :Tabel 13. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2020 dan 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2020 | TA 2019 |
| Uang Muka dari KPPN | **77.548.750** | **0** |
| Jumlah | **77.548.750** | **0** |

  |
|  | Utang Kepada Pihak Ketiga |
| ***Utang Kepada Pihak Ketiga:*** ***Rp0*** | Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).  |
|  | Ekuitas  |
| ***Ekuitas:******Rp32.793.363*** | Ekuitas per 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.793.363 dan Rp30.113.074. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. |

|  |
| --- |
| **Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional** |
| **Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak** |
| *Pendapatan PNBP : Rp696.925.382* | Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp696.925.382 dan Rp598.265.600. Pendapatan tersebut terdiri dari:Tabel 14. Rincian Pendapatan PNBP per 30 September 2020 dan 2019 ***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **TA 2020** | **TA 2019** | **Naik(Turun)** | **%** |
| Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | **10.000** | **30.000** | **-20.000** | **-66,67** |
| Pendapatan Uang Meja dan Upah Pada Panitera  | **11.740.000** | **15.758.000** | **-4.018.000** | **-25,50** |
| Pendapatan Ongkos Perkara | **258.345.000** | **253.885.000** | **4.460.000** | **1,76** |
| Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | **426.830.382** | **328.592.600** | **98.237.782** | **29,90** |
|  Total  | **696.925.382**  | **598.265.600**  | **397.911.321** | **16,49** |

 |
| **Beban Pegawai** |
| **Beban Persediaan** |
| *Beban Persediaan : Rp16.940.672* | Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.940.672 dan Rp16.683.297. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 September 2020 dan 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **TA 2020** | **TA 2019** | **Naik(Turun)** | **%** |
| Beban Persediaan Konsumsi | **16.940.672** | **16.683.297** | **257.375** | **1,54** |
|  Total Beban Persediaan | **16.940.672**  | **16.683.297**  | **257.375** | **1,54** |

 |
| **Beban Barang dan Jasa** |
| *Beban Barang dan Jasa: Rp664.900.820* | Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp386.449.600 dan Rp361.726.980. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:Tabel 15. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September 2020 dan 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **TA 2020** | **TA 2019** | **Naik(Turun)** | **%** |
| Beban Sewa | **12.300.000** | **0** | **12.300.000** | **0,00** |
| Beban Barang Opersional Lainnya | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0,00** |
|  Beban Barang Non Operasional Lainnya | **364.524.000** | **399.541.000** | **-35.017.000** | **-8,76** |
| Beban Jasa Konsultan | **273.076.820** | **248.911.960** | **24.164.860** | **9,71** |
|  Total Beban Barang dan Jasa | **664.900.820**  | **361.726.980**  | **303.173.840** | **83,81** |

 |
| **Beban Pemeliharaan** |
| *Beban Pemeliharaan: Rp0*  | Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset yang sudah ada ke dalam kondisi normal. |
| **Beban Perjalanan Dinas** |
| *Beban Perjalanan Dinas : Rp404.951.635* | Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp404.951.635 dan Rp393.696.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2020 dan 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **TA 2020** | **TA 2019** | **Naik(Turun)** | **%** |
| Beban Perjalanan Biasa | **325.911.635** | **322.826.000** | **3.085.635** | **0,96** |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | **79.040.000** | **70.870.000** | **8.170.000** | **11,53** |
|  Total Beban Perjalanan Dinas | **404.951.635**  | **393.696.000**  | **11.255.635** | **2,86** |

 |
| **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat** |
| *Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0*  | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.  |
| **Beban Bantuan Sosial** |
| *Beban Bantuan Sosial : Rp 0*  | Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.  |
| **Beban Penyusutan dan Amortisasi** |
| *Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0*  | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.  |
| **Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih** |
| *Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0*  | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  |
| **Beban Lain-lain** |
| *Beban Lain-Lain : Rp 0*  | Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.  |
| **Kegiatan Non Operasional** |
| *Pendapatan Kegiatan Non Operasional : Rp268.119* | Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian atas Pendapatan dan Beban Non operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  per 30 September TA 2020 dan TA 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2020  | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | **268.119** | **0** | **268.119** | **0,00** |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | **268.119** | **0** | **268.119** | **0,00** |

 |
| **Pos Luar Biasa** |
| *Beban Pos Luar Biasa : Rp 0*  | Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. |
| **Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas** |
| **Ekuitas Awal** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ekuitas Awal: Rp.30.113.074* | Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 sebesar Rp30.113.074 dan Rp43.954.576. |

### Surplus (Defisit) LO

|  |  |
| --- | --- |
| *Defisit LO Rp(389.599.626)* | Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(389.599.626) dan Rp(460.566.657). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. |

### Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

|  |  |
| --- | --- |
| *DKPKA/ kesalahan mendasar Rp0* | Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 30 September 2020 sebesar Rp0. |

### Penyesuaian Nilai Aset

|  |  |
| --- | --- |
| *Penyesuaian Nilai Aset Rp0* | Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. |

### Koreksi Nilai Persediaan

|  |  |
| --- | --- |
| *Koreksi Nilai Persediaan Rp0* | Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  |

### Selisih Revaluasi Aset Tetap

|  |  |
| --- | --- |
| *Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0* | Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  |

### Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

|  |  |
| --- | --- |
| *Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0* | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. |

### Koreksi Lain-lain

|  |  |
| --- | --- |
| *Koreksi Lain-lain Rp0* | Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. |

### Transaksi Antar Entitas

|  |  |
| --- | --- |
| *Transaksi antar entitas Rp392.279.915* | Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp392.279.915 dan Rp438.285.260. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: |

### Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2020, DDEL sebesar Rp697.005.382 sedangkan DKEL sebesar Rp1.069.852.455.

### Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Keluar merupakan transaksi yang diterima/ dikirim dari entitas lain tanpa melalui pencairan dana. Dalam hal ini transfer masuk dan transfer keluar berupa blanko akta cerai yang dikirim oleh Badan Peradilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan dikirim kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram ke semua Satuan Kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Barang tersebut dicatat sebagai barang persediaan yang digunakan untuk kepentingan penyelesaian perkara. Pada periode hingga 30 September 2020, Transfer masuk sebesar Rp42.327.857 sementara Transfer Keluar sebesar Rp22.895.015. Transfer Keluar/ Masuk antara Badilag dan PTA Mataram dibuktikan dengan BAST Nomor 349/DjA.1/PL/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 sejumlah 205 buku dengan harga satuan Rp111.683. Blanko akta cerai tersebut kemudian dikirim ke 17 satuan kerja di bawah PTA Mataram dengan BAST terlampir.

|  |
| --- |
| Pengesahan Hibah Langsung |
|  | Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2020, sebesar 0-. dari total 0,- yang diterima sepanjang Tahun 2020 .Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2020 adalah Rp0.Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
| 1 | **NIHIL** | **Uang** | **0** |
| 2 | **NIHIL** | **Barang** | **0** |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran. |
| Ekuitas Akhir |
|  | Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.793.363 dan Rp21.673.179. |
|  |  |

##

## Pengungkapan Penting Lainnya

### Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk disampaikan dalam Laporan Keuangan tingkat wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020 ini.

### Pengungkapan Lain-lain

### Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada seluruh satker terhadap Laporan Keuangan Tahun yang lalu yang layak untuk diungkapkan pada Laporan Keuangan tingkat wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020 ini.

### Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi akural per 30 September 2020. Informasi akrual per 1 Januari 2020 yaitu Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya yang merupakan Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan di akhir Tahun Anggaran sebelumnya. PNBP tersebut berasal dari PA Mataram dan PA Taliwang antara lain berupa pendapatan hak redaksi, PBT, pencabutan gugatan, dan penyerahan Salinan putusan. Telah dibuatkan jurnal pembalik atas transaksi tersebut.

### Rekening Pemerintah

Masing-masing satker memiliki minimal 3 (tiga) rekening pemerintah yaitu untuk menampung dana DIPA 01, DIPA 04, dan Biaya Perkara. Rincian mengenai Rekening pemerintah dan saldonya dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

###

### Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara baik yang berada di brankas maupun di rekening penitipan biaya perkara dapat dilihat pada tabel berikut:



### Revisi DIPA

Revisi DIPA terjadi pada PTA Mataram dan PA Mataram, masing-masing untuk keperluan perubahan nama Pejabat Perbendaharaan dan revisi rencana penarikan dana. Khusus revisi DIPA PTA Mataram juga mengurangi pagu yaitu pengurangan pagu perjalanan dinas yang dilakukan secara nasional oleh Biro Perencanaan MA RI untuk keperluan penanggulangan pandemi covid 19.

### Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat informasi mengenai ralat SPM, SSBP dan SSPB pada Laporan Keuangan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 September 2020.

### Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya.

*LAPORAN PENDUKUNG*

# Laporan-laporan Pendukung

## Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

1. *RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Tinggi Agama Mataram**

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**

**untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2020**

Tabel 17 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya** | **0** | **0** | **0** |

1. *INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL*

## Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

**JURNAL PENYESUAIAN**

****

Tabel 18 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

## Daftar Rekening Kementrian/Lembaga 2016

1. *DAFTAR REKENING KEMENTRIAN / LEMBAGA*

#### Daftar Rekening Kementrian Negara/Lembaga **Tahun 2020**



Mataram, 09 Oktober 2020

Kepala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah Nusa tenggara barat

Sekretaris,

MISNUDIN, SH., MH.

NIP. 196412311994031046

1. *MONITORING PENUTUPAN REKENING KEMENTRIAN / LEMBAGA*

## Monitoring Penutupan Rekening Kementrian/Lembaga 2016

#### Monitoring Penutupan Rekening Kementrian Negara/Lembaga **Tahun 2020**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Satker | Nomor Rekening | Tanggal Penutupan | Saldo yang Disetor | Tanggal dan Surat Bank | Keterangan |
| - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |



Mataram, 09 Oktober 2020

Kepala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah nusa tenggara barat

Sekretaris,

MISNUDIN, SH., MH.

NIP. 196412311994031046

1. *DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/ BARANG/ JASA*

## Daftar Hibah Langsung

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**

**untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2020**

Tabel 19 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan |
|  |  | U |  |  |  | Nilai | Keterangan |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  | **Jumlah :** |  |  |  |  |

1. *Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

## Daftar Hibah Langsung

**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | LOKASI | NO. KONTRAK | NILAI KONTRAK | PERSENTASE PENGERJAAN | NILAI PEKERJAAN | KETERANGAN |
|  | NIHIL |  |  |  |  |  |  |